

Laporan Kegiatan Diskusi

Perempuan Bantul : yang berbicara, yang berorganisasi

Oleh: Wulani Sriyuliani¹ | 22 Juli 2011

Tema Diskusi:

Pengorganisasian Perempuan Pedesaan: Tantangan dan Peran Fasilitator

Tempat: **Sekretariat Serikat Perempuan Bantul (SPB) |**

Jl. Parangtritis Km.13 Ngangkruk No. 4 Bantul-Yogyakarta

Waktu: **Senin, 4 Juli 2011 | 13.45 – 16.30 WIB**

Pengantar

Perempuan miskin pedesaan selalu menjadi persoalan pembangunan yang penting untuk diselesaikan. Kemiskinan seringkali mendorong perempuan untuk turut bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya tidak sejalan dengan peran perempuan yang semakin tinggi/bertambah, mereka masih dipandang sebelah mata dan sekaligus mengalami diskriminasi dan subordinasi baik oleh lingkungan sosial, politik bahkan dalam relasinya lingkup domestik (rumah tangga). Melalui pengorganisasian perempuan, kelompok ini diharapkan dapat mengekspresikan dirinya secara individu dan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Peka terhadap isu pengorganisasian perempuan tersebut, Pusat Analisis Sosial, Yayasan AKATIGA bekerjasama dengan SPB mengadakan diskusi yang berjudul '**Pembelajaran menjadi Fasilitator yang Bermakna dalam Pengorganisasian Perempuan**'. Selain oleh anggota SPB, diskusi juga dihadiri oleh, Serikat Perempuan Independen (SPI) Kabupaten Kulonprogo, dan Koperasi Wanita SETARA Klaten. Peserta yang hadir dalam diskusi berjumlah 30 orang, termasuk moderator, narasumber dan perwakilan AKATIGA. Kehadiran peserta diskusi didominasi perempuan, mayoritas merupakan fasilitator atau kader organisasi. Narasumber dalam diskusi adalah

¹ Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Bandung dan saat ini tercatat sebagai peneliti magang di AKATIGA.

Titik Hartini (Direktur Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) dan mantan Sekjen Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)).

Seri diskusi yang diadakan di Bantul, Yogyakarta ini merupakan diskusi lanjutan dari rangkaian seri diskusi dengan tema pengorganisasian perempuan (http://www.akatiga.org/index.php/sumberreferensi/doc_download/83-taktis-merintis-organisasi-perempuan-desa). Diskusi kali ini membahas lebih dalam mengenai pengorganisasian perempuan termasuk peran fasilitator di dalamnya dan menjadi sarana bertukar pendapat, pemikiran, dan pengalaman, hingga ajang *curhat* fasilitator mengenai persoalan pengorganisasian perempuan.



Foto 1. Kantor Sekretariat Serikat Perempuan Bantul (SPB).

Pembelajaran menjadi Fasilitator untuk Pengorganisasian Perempuan

Titik Hartini membuka presentasi dengan melontarkan pujian terhadap peran ganda yang diemban perempuan. Peran ganda tersebut meliputi peran sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga. Uraian presentasi terbagi menjadi empat bagian, pada bagian pertama, narasumber mengurai profil perempuan pelaku usaha mikro. *Mbak Marni*, merupakan pelaku usaha dari dusun Gathok, Klaten, yang berperan ganda sebagai ibu sekaligus tumpuan keluarga. Rutinitas Ibu Marni menjadi berkali lipat

dengan perannya sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga. Kondisi tersebut merupakan potret keseharian perempuan desa di Indonesia. Proses pengorganisasian bertujuan untuk menghimpun kekuatan perempuan dalam suatu wadah yang tidak hanya membina urusan menyajikan panganan saja.²

Selanjutnya, pada bagian kedua, presentasi mengurai persoalan umum yang dihadapi perempuan pelaku usaha mikro dan pengaruhnya pada proses pengorganisasian perempuan. Persoalan dalam mendapatkan modal usaha, persaingan usaha yang ketat, keterbatasan keterampilan produksi dan manajemen usaha merupakan persoalan yang kerap dihadapi. Sepintas memang tidak ada perbedaan antara pelaku usaha laki-laki dan perempuan. Bedanya, pengambilan keputusan perempuan terkait usaha harus didiskusikan lebih dulu untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan suami. Situasi ini seolah memperlihatkan dualisme posisi perempuan didalam rumah tangga. Secara finansial, perempuan mungkin berhasil menopang sumber penghasilan keluarga. Tapi, kondisi tersebut tidak otomatis membuka akses seluas-luasnya pada perempuan untuk berkegiatan publik. Istilahnya, semandiri-mandirinya perempuan, tetap harus meminta ijin dulu sebelum keluar rumah.

Seringkali, ketidakmandirian tersebut berpengaruh pada terbatasnya akses perempuan dalam kegiatan publik. Secara individu, perempuan diharapkan memiliki ruang untuk berekspresi. Proses pengorganisasian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas individu maupun sosial. Melalui proses pemberdayaan, perempuan diharapkan dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya, seperti mengutarakan pendapatnya di depan publik atau bernegosiasi dengan suami. Hal inilah yang ditekankan pada bagian ketiga uraian presentasi.

Terakhir, narasumber menekankan peran yang dapat dimaksimalkan kelompok fasilitator dan kader perempuan dalam proses pengorganisasian perempuan. Peran fasilitator tidak hanya membangun kesadaran kritis perempuan untuk berorganisasi, tapi

² Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perkawinan 1/1974 pasal 34 (1 dan 2) yang mengatur pembagian kerja dalam rumah tangga. Identifikasi, suami adalah kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan bertanggungjawab sebagai istri yang mengurus kebutuhan rumah tangga.

Pelabelan tersebut diadopsi pula dalam gerakan pengorganisasian perempuan yang dicanangkan pemerintah, atau yang dikenal Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam program kerja PKK, pengorganisasian perempuan difokuskan pada pembinaan kebutuhan praktis domestik, seperti pola asuh anak, sandang, pangan, tata laksana rumah tangga, dsb.

juga meningkatkan kapasitas organisasi secara internal, seperti teknis mengelola kelompok secara efektif, memahami penyusunan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan anggota, cara menyampaikan aspirasi dan bernegosiasi yang tepat. Pada dasarnya, fasilitator dan kader disiapkan untuk dapat memfasilitasi aspirasi perempuan.



Foto 2. Titik Hartini (kiri) menjelaskan pentingnya pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan dalam diskusi *Pembelajaran menjadi Fasilitator yang Bermakna dalam Pengorganisasian Perempuan*, pada 4 Juli 2011 di ruang pertemuan Sekretariat SPB, Bantul-Yogyakarta.

Diskusi hangat terjadi ketika dibuka sesi pertama untuk pertanyaan dan tanggapan peserta. Hampir seluruh peserta diskusi yang hadir merupakan fasilitator dan kader. Maka dari itu, pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah mengenai peran fasilitator dalam proses pengorganisasian perempuan. Hambatan yang paling sering ditemui fasilitator adalah menjaga konsistensi anggota pengorganisasian untuk terus hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pengorganisasian seperti, pelatihan atau training. Peserta yang hadir sepakat bahwa proses negosiasi dengan kepala rumah tangga, baik suami atau ayah (bagi anggota yang belum menikah) merupakan tahap

yang (istilahnya) *gampang-gampang susah*. Posisi perempuan dalam mengambil putusan menjadi sulit dalam relasi di rumah karena adanya anggapan keanggotaan dalam organisasi akan menyita waktu perempuan dan otomatis menghambat peran domestik perempuan. Ibu-ibu menceritakan kesulitannya bernegosiasi dengan suami untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Belum lagi ada beberapa ibu dengan beban sebagai tulang punggung keluarga yang mengharuskannya cermat dalam manajemen waktu.

Pertanyaannya kemudian, apa yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat mencapai kondisi ideal di atas? Kondisi ideal dapat dicapai, apabila perempuan dapat melaksanakan empat poin penting dalam pembelajaran perempuan berorganisasi, yaitu manajemen waktu, kejujuran, komitmen, dan konsistensi. Keempat poin di atas dirangkum berdasar hasil diskusi peserta yang hadir dan menceritakan pengalamannya.

Pentingnya mengatur waktu bagi perempuan untuk mematahkan asumsi bahwa kegiatan organisasi dapat menghambat ekonomi dan peran domestik keluarga. Beberapa menganjurkan untuk menyelesaikan pekerjaan domestik dan hal tersebut dapat dilakukan jika perempuan pintar mengatur waktunya. Setelah itu modal berikutnya adalah kemampuan berbicara. "*Modal pertama perempuan itu bicara,*" ujar salah satu peserta. Kemampuan berbicara dapat diperoleh dalam kegiatan organisasi melalui berbagai macam pelatihan. Berbicara dalam hal ini adalah perempuan berani mengutarakan pendapatnya, *uneg-uneg*, keinginan, bahkan emosinya. Persoalan umum yang kerap dihadapi anggota organisasi adalah ketika meminta izin keluar rumah. Seolah alasan berorganisasi dianggap sebagai 'tameng' berselingkuh (bagi anggota organisasi yang sudah menikah) atau hanya alasan bermain di luar rumah agar lepas dari tanggung jawab domestik rumah tangga. Sedangkan, proses membangun kepercayaan pada suami atau orang tua bukanlah proses sehari semalam. Maka dari itu, pesan Titik Hartini yang segera disepakati peserta diskusi, "*jika perempuan ingin diberi kepercayaan, maka bersikap jujurilah.*"

Salah satu resep keberhasilan dari proses penguatan pengorganisasian (internal) terletak pada komitmen dan konsistensi perempuan. Pengorganisasian akan bermanfaat jika dilakukan berkelanjutan dan menyeluruh. Kedua hal ini sebaiknya tidak hanya dipahami oleh fasilitator dan kader, tapi juga oleh anggota organisasi. Contohnya saja,

manfaat keahlian berbicara tidak didapat hanya oleh satu atau dua kali berkegiatan. Jadi, untuk mendapatkan manfaat dari proses pengorganisasian bukanlah proses instan. Sedangkan, untuk menguatkan peran fasilitator dan internal organisasi, Titik menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis. Idealnya, melalui pengorganisasian, fasilitator dapat mendorong anggota untuk mengakumulasi modal, seperti membangun aset lokal, memberdayakan potensi pelaku ekonomi mikro perempuan, dan meningkatkan kualitas usaha mikro perempuan. Pertanyaan kemudian, bagaimana menjadi fasilitator yang memiliki kapabilitas untuk memaksimalkan fungsi organisasi sendiri? Jawabannya sederhana, "*pengorganisasian keluarga*," tegas Titik yang langsung disambut hangat peserta diskusi. Fasilitator dan kader efektif adalah kader yang berhasil mengorganisasikan keluarganya lebih dulu sebagai lingkungan sosial terkecil dalam masyarakat.

Beberapa peserta terlihat kembali mengacungkan jarinya. Terlihat beberapa wajah yang ingin segera mengutarakan perasaan dan pengalamannya setelah mendengar kalimat terakhir yang ditekankan narasumber. Suatu rumah tangga atau keluarga selalu memiliki kepala rumah tangga, yang umumnya menjadi tanggungjawab suami atau laki-laki. Mengorganisasikan keluarga berarti turut pula mengikutsertakan keterlibatan kepala rumah tangga. Keluhan pun bermunculan. Protes terhadap kasus penindasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga pun kembali dibahas. Penindasan tidak hanya bersifat fisik, dalam tema pengorganisasian perempuan, jawaban "*tidak*" atau larangan ikut serta tanpa alasan masuk akal oleh suami, juga merupakan salah satu contoh penindasan dalam rumah tangga.



Foto 3. Ruang pertemuan SPB dan suasana diskusi.



Foto 4. Berbicara dan mengemukakan pendapat didepan publik menjadi agenda dalam proses pengorganisasian perempuan

Menariknya, menjelang akhir diskusi, salah satu perwakilan peserta dari Koperasi Wanita SETARA Klaten menyampaikan kemajuan dalam organisasinya, yang ditunjukkan dengan kebebasan anggota perempuan untuk aktif dalam kegiatan organisasi secara bertanggungjawab. Kondisi positif tersebut diakui merupakan salah satu manfaat dari pengadaan pelatihan oleh organisasi dengan tema kesetaraan gender yang melibatkan istri dan suami. Satu satu hasil ideal yang sudah dicapai misalnya istri tidak perlu merasa khawatir untuk ikut berorganisasi karena suami tidak hanya memberikan kepercayaan tapi juga ikut memikul pekerjaan rumah tangga. Situasi di atas merupakan perwujudan dari tahapan ideal dari kesetaraan posisi perempuan dalam rumah tangga.

Pemahaman kaum laki-laki terhadap pentingnya penguatan kelompok perempuan bukan untuk menggeser kedudukan lelaki dalam struktur rumah tangga. Idealnya, kesetaraan dalam rumah tangga akan mendorong partisipasi perempuan dalam berorganisasi yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pada akhir diskusi, peserta menyepakati dan menyimpulkan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam proses pengorganisasian perempuan. Gerakan mengorganisasikan perempuan bukanlah gerakan sepihak. Sehingga, tantangan kelompok perempuan kedepan tidak hanya melakukan penguatan internal organisasi yang lebih teknis tapi juga meliputi distribusi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pada kelompok laki-laki baik suami, anak, bahkan mertua lelaki. ***